

No.Katalog: 3205005.3307

# KEMISKINAN KABUPATEN WONOSOBO 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN WONOSOBO**



# KEMISKINAN KABUPATEN WONOSOBO 2021



# Kemiskinan Kabupaten Wonosobo 2021

ISBN :  
No.Publikasi : 33070.23.30  
Katalog : 3205005.3307

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm  
Jumlah Halaman : x+54 halaman

Naskah:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Penyunting:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Sumber Ilustrasi:  
canva.com

Penerbit:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggunakan sebagian atau seluruh isi buku untuk tujuan komersial tanpa  
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## TIM PENYUSUN

**Penanggung jawab:**

Dr. Mustaqim, S.ST., S.E., M.Si

**Penyunting**

Bibit Setyaningrum, A.Md

**Penulis:**

Wulandari, S ST, M.Stat.

**Cover**

Wulandari, S.ST., M.Stat

**Pembuat Infografis:**

Wulandari, S ST, M.Stat.

<https://wonosobokab.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Kemiskinan adalah permasalahan multidimensional yang erat kaitannya dengan bidang-bidang lain dalam kehidupan. Permasalahan ini dihadapi baik level nasional maupun regional. Penurunan angka kemiskinan menjadi isu dan agenda penting dalam rencana pembangunan di semua level pengambil kebijakan. Ketersediaan data kemiskinan sangat bermanfaat dalam evaluasi terhadap strategi pengentasan kemiskinan ataupun pembuatan rencana pengentasan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik mengeluarkan angka kemiskinan hingga level kabupaten setiap setahun sekali. Angka kemiskinan ini merupakan hasil dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Publikasi “Kemiskinan Kabupaten Wonosobo 2021” memberikan gambaran tentang tingkat kemiskinan makro penduduk Kabupaten Wonosobo selama tahun 2017 – 2021. Selain menyajikan angka kemiskinan makro, publikasi ini juga berisi bagaimana tahapan penghitungan angka kemiskinan dari data Susenas.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait kemiskinan dan pola konsumsi, baik pemerintah daerah maupun akademisi.

Wonosobo, Desember 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Wonosobo



Dr. Mustaqim, S.ST., S.E., M.Si





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Grafik .....	ix
Bab I. Pendahuluan .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Sistematika Penulisan.....	4
Bab II. Metodologi .....	5
2.1 Sumber Data.....	5
2.2 Konsep dan Definisi Kemiskinan .....	5
2.3 Pengukuran Kemiskinan .....	6
2.4 Penghitungan Kemiskinan.....	8
2.4.1 Menentukan Populasi Referensi.....	8
2.4.2 Menghitung Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan Tingkat Provinsi.....	9
2.4.3 Menghitung Garis Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota.....	12
2.5 Indikator-indikator Kemiskinan .....	12
2.6 Kalori .....	15
2.7 Konsep dan Definisi Secara Umum .....	15
Bab III. Kemiskinan Kabupaten Wonosobo .....	19
3.1 Kondisi Kemiskinan .....	19
3.1.1 Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2020 .....	19
3.1.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2020 .....	21
3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2011 – 2020.....	23

3.2 Karakteristik Penduduk Miskin .....	28
3.2.1 Pendidikan.....	28
3.2.2 Ketenagakerjaan .....	34
3.2.3 Perumahan .....	38
3.2.4 Pola Konsumsi.....	40
Daftar Pustaka.....	43
Lampiran.....	45

<https://wonosobokab.bps.go.id>

## DAFTAR GRAFIK

Gambar 2.1	Penentuan Populasi Referensi	8
Gambar 2.2	Contoh Penghitungan Garis Kemiskinan Sementara dan Populasi Rerefensi	9
Grafik 3.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	19
Grafik 3.2	Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2017 – 2021	21
Grafik 3.3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2017 – 2021	25
Grafik 3.4	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2017 – 2021	26
Grafik 3.5	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan	29
Grafik 3.6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angka Melek Huruf (AMH), 2017 - 2021	32
Grafik 3.7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2017 - 2021	33
Grafik 3.8	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha, 2017 – 2021	35
Grafik 3.9	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Formal/Informal, 2017 – 2021	37
Grafik 3.10	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama, 2017 – 2021	39
Grafik 3.11	Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin untuk Komoditas Makanan dan Non Makanan, 2017 - 2021	41



# Karakteristik Penduduk Miskin Wonosobo 2021

## Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan



Tidak/Belum Tamat SD	26,96%
Tamat SD/SMA	63,86%
Tamat SMA+	9,18%

## Lapangan Usaha

Tidak Bekerja	36,93%
Pertanian	39,67%
Bukan Pertanian	23,40%



## Konsumsi

Makanan	63,11%
Nonmakanan	36,89%





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian utama. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun.

Permasalahan kemiskinan mendapat perhatian yang besar karena disadari bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang erat kaitannya dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, keamanan, politik, dll. Hingga saat ini, permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu agenda utama yang harus diatasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dimulai sejak era orde baru hingga saat ini. Berbagai strategi pengentasan kemiskinan sudah dijalankan pemerintah Indonesia, dari level pemerintah pusat hingga level pemerintah daerah.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tepat bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan antar daerah, serta menentukan target penurunan jumlah penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Sampai dengan

tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisah menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Selanjutnya sejak 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk masing-masing provinsi. Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (kecuali tahun 2008), pada tahun 2011 – 2014 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran Triwulan I, II, III, IV dan pada tahun 2015 – 2021 menggunakan data Susenas Konsumsi Pengeluaran.

## **1.2 Tujuan**

Publikasi ini bertujuan memberikan data dan informasi tentang:

- a. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 – 2021
- b. Karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2017 – 2021
- c. Gambaran penghitungan indikator-indikator kemiskinan

## **1.3 Sistematika Penyajian**

Publikasi ini disajikan dalam tiga bab sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan sistematika pembahasan

Bab dua berisi metodologi yang berisi konsep dan defeni, penghitungan kemiskinan dan teori yang dipakai dalam analisis kemiskinan

Bab tiga berisi tentang analisis kemiskinan yang berisi berbagai ukuran kemiskinan dan karakteristik penduduk miskin



## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1 Sumber data**

Publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 – 2021. Tingkat kemiskinan disini merupakan kondisi Maret setiap tahunnya. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2017 – 2021” yang mana publikasi tersebut bersumber dari data Susenas Konsumsi Pengeluaran maupun Susenas Kor untuk keterangan karakteristik rumah tangga maupun penduduk miskin.

#### **2.2 Konsep dan Definisi Kemiskinan**

Robert Chambers (1984) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan selama ini sering dikonsepsikan dalam konteks ekonomi, yaitu ketidakcukupan pendapatan dan asset untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Tetapi sebenarnya pengertian kemiskinan jauh lebih luas dari sekedar penurunan pendapatan dan aset, sebagaimana Bank Dunia mendefinisikan bahwa kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan kurangnya keterwakilan dan kebebasan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*

*approach*) dalam mengukur kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antar kelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan. Dalam menentukan kelompok penduduk miskin, standar minimum pengukuran kemiskinan disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu yang berfokus pada kelompok penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut besaran pendapatan/pengeluaran. Kelompok inilah yang didefinisikan sebagai kelompok relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada kondisi distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

### **2.3 Pengukuran Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik mengeluarkan dua jenis data kemiskinan yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Data makro biasanya digunakan untuk *geographical targeting* sedangkan data kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk keperluan *household targeting* seperti perlindungan sosial.

Kedua data ini memiliki kriteria, pengukuran, dan cakupan kemiskinan yang berbeda.

Kemiskinan makro dikeluarkan BPS sejak tahun 1976. Saat ini data kemiskinan makro bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilaksanakan setahun 2 kali yaitu Maret dan September, dimana Susenas Maret akan menghasilkan data kemiskinan hingga level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sedangkan Susenas September menghasilkan data kemiskinan level provinsi dan nasional. Konsep yang digunakan adalah *basic need approach* yang didasarkan pada garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan (akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya). Data yang dihasilkan berupa jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Pemanfaatan dari data ini adalah untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis tetapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin tersebut.

Berbeda dengan kemiskinan makro yang datanya rilis setiap tahun, BPS mengeluarkan data kemiskinan mikro tercatat sebanyak 4 kali yaitu tahun 2005, 2008, 2011, dan 2015. Konsep yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan mikro adalah konsep multidimensi yaitu didasarkan pada indeks atau PMT dari ciri-ciri rumah tangga miskin. Data yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan mikro bersumber dari hasil PSE2005, PPLS2008, PPLS2011, dan PBDT2015. Data yang dihasilkan berupa jumlah rumah tangga sasaran (sangat miskin, miskin, hampir/rentan miskin) *by name by address*. Pemanfaatan data ini digunakan untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb).

Dalam publikasi ini, penghitungan kemiskinan yang disajikan adalah kemiskinan makro. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yang diperoleh dari hasil Susenas.

## 2.4 Penghitungan Kemiskinan

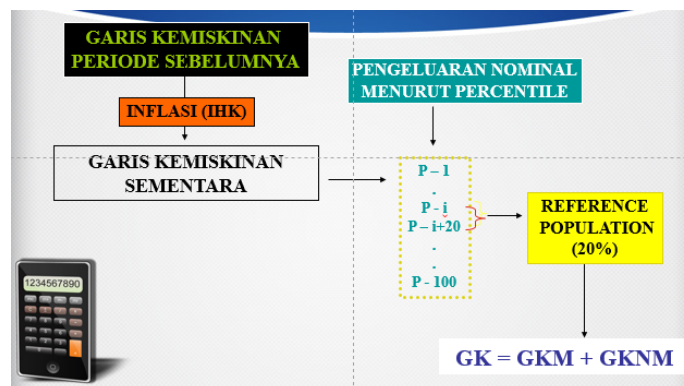
Secara garis besar, berikut adalah langkah-langkah dalam penghitungan angka kemiskinan.

1. Menentukan populasi referensi
2. Menghitung garis kemiskinan makanan dan nonmakanan
3. Penghitungan garis kemiskinan serta indikator-indikator kemiskinan

### 2.4.1 Menentukan Populasi Referensi

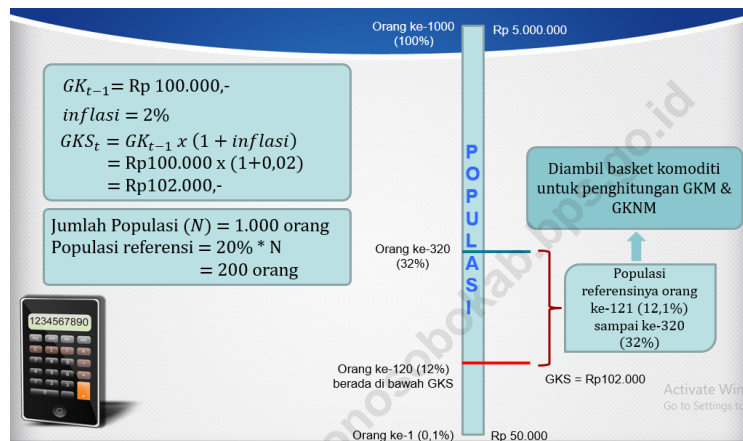
Tahap pertama adalah menentukan populasi referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Populasi referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang dikalikan dengan inflasi umum (IKH). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

Gambar 1. Penentuan Populasi Referensi



Sebagai contoh, total sampel Susenas Maret adalah 200 rumah tangga. Dari 200 rumah tangga tersebut ternyata anggota rumah tangga adalah 1000 orang. Maka populasi referensi adalah sebanyak  $20\% \times 1000$  atau 200 orang yang berada di atas GKS.

Gambar 2. Contoh Penghitungan Garis Kemiskinan Sementara dan Populasi Rereferensi



## 2.4.2 Menghitung Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan Tingkat Provinsi

Metode yang digunakan untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

**Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan minuman dari 52 komoditi yang riil dikonsumsi oleh penduduk, kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan minuman diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Patokan 2.100 kalori ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai

pengeluaran riil kebutuhan makanan minuman dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut.

Formula dalam menghitung GKM adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Keterangan:

$GKM_j$  = garis kemiskinan makanan daerah  $j$  (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kalori)

$P_{jk}$  = harga komoditi  $k$  di daerah  $j$

$Q_{jk}$  = rata-rata kuantitas komoditi  $k$  yang dikonsumsi di daerah  $j$

$V_{jk}$  = nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi  $k$  di daerah  $j$

$j$  = daerah (perkotaan atau perdesaan)

Garis kemiskinan  $GKM_j$  tersebut disetarakan dengan 2.100 kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah  $j$  dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Keterangan:

$K_{jk}$  = kalori dari komoditi  $k$  di daerah  $j$

$\overline{HK}_j$  = harga rata-rata kalori di daerah  $j$

Sedangkan

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2.100$$

$F_j$  = kebutuhan minimum makanan di daerah  $j$ , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari

**Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM)** merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis

barang dan jasa nonmakanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komodisi) di perdesaan.

Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/ subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum nonmakanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_j = GKNM_j = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Keterangan

$NF_j$  = pengeluaran minimum nonmakanan atau garis kemiskinan nonmakanan daerah  $j$  (GKNM<sub>j</sub>)

$V_i$  = nilai pengeluaran per komoditi/subkelompok nonmakanan  $i$  di daerah  $j$  (dari Susenas Modul Konsumsi)

$r_i$  = rasio pengeluaran komoditi/subkelompok nonmakanan  $i$  menurut daerah (hasil SPKKD 2004)

$i$  = jenis komoditi nonmakanan terpilih di daerah  $j$

$j$  = daerah (perkotaan atau perdesaan)

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis kemiskinan makanan (GKM) dan Garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Dengan formulasi di sebelumnya, maka garis kemiskinan dihitung dengan formulasi:

$$GK = F_j + NF_j$$

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapitan per bulan di bawah Garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

#### 2.4.3 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota

- Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh:
  - a. Keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota
  - b. Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan
- Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
  - a. Menentukan garis kemiskinan sementara (GKS) untuk tingkat kabupaten/kota dengan cara:
  - b. Menentukan P0 sementara kabupaten/kota ke-*i* di provinsi ke-*j* yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan P0 provinsi ke-*j* periode *t* ke *t-1* dengan P0 kabupaten ke-*i* pada tahun *t-1*
  - c. Menetapkan garis kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan P0 sementara
  - d. Menghitung indikator-indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT

#### 2.5 Indikator-indikator Kemiskinan

**Foster-Greer-Thotbecke (1984)** telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$



Keterangan:

$\alpha$  = 0,1,2

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1,2,3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk di bawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk

Jika  $\alpha=0$  maka akan diperoleh persentase penduduk miskin (*head count index* P0)

Jika  $\alpha=1$  maka akan diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* P1)

Jika  $\alpha=2$  maka akan diperoleh indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* P2)

**Head Count Index (HCI-P0)** adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). Sesuai rumus di atas, ketika  $\alpha=0$  maka akan didapatkan indikator P0 ini, sehingga indikator ini hanya akan mengelompokkan seseorang ke kategori miskin atau tidak miskin saja, sehingga angka yang dihasilkan adalah persentase penduduk miskin.

**Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty gap index-P1)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kesenjangan pengeluaran yang dimaksudkan disini adalah selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Walaupun indikator ini dapat mengukur kedalaman kemiskinan, akan tetapi indikator ini tidak dapat mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan

**Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty severity index-P2*)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Contoh penghitungan P0, P1, dan P2

- Sebagai contoh di wilayah A terdapat 4 penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan berturut-turut Rp 99.000,-; Rp 101.000; Rp 150.000,-; Rp 150.000,-. GK di wilayah tersebut adalah Rp 125.000,-.
- Di Wilayah B terdapat 4 penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan berturut-turut Rp 79.000,-; Rp 121.000; Rp 150.000,-; Rp 150.000,-. GK di wilayah tersebut adalah Rp 125.000,-.

Wilayah A	INDIVIDU				
	#1	#2	#3	#4	
GK (z)	125.000	125.000	125.000	125.000	
Wilayah A ( $y_i$ )	99.000	101.000	150.000	150.000	P0 50,00
<i>Poverty Gap</i> ( $z - y_i$ )	26.000	24.000	0	0	
$G/z \left( \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^1 \right)$	0,20800	0,19200	0	0	P1 10,00
$(G/z)^2 \left( \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^2 \right)$	0,04326	0,03686	0	0	P2 2,00

Wilayah B	INDIVIDU				
	#1	#2	#3	#4	
GK (z)	125.000	125.000	125.000	125.000	
Wilayah B ( $y_i$ )	79.000	121.000	150.000	150.000	P0 50,00
<i>Poverty Gap</i> ( $z - y_i$ )	46.000	4.000	0	0	
$G/z \left( \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^1 \right)$	0,36800	0,03200	0	0	P1 10,00
$(G/z)^2 \left( \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^2 \right)$	0,13542	0,00102	0	0	P2 3,41

## 2.6 Kalori

Kalori adalah satuan ukuran untuk energi. Satu kalori secara resmi didefinisikan sebagai jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 cm<sup>3</sup> air (atau 1 gram air) sebesar satu derajat celcius. Untuk mengukur jumlah energi dalam makanan, ahli gizi umumnya menggunakan kilokalori (setara dengan 1000 kalori). Label pengukuran biasanya ditulis sebagai "kkal". Satu kkal setara dengan 4.184 kalori.

## 2.7 Konsep dan Definisi Secara Umum

### Pendidikan

- a. Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi 3 (tiga), yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA ke atas (SMA sampai perguruan tinggi).
- b. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf Arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf penduduk miskin menurut umur 15 - 24 tahun dan 15 - 55 tahun.
- c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun, 16 - 18 tahun, dan 19 - 24 tahun) yang masih bersekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berumur sekolah.

## **Ketenagakerjaan**

- a. Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.
- b. Bekerja di sektor informal penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- c. Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.
- d. Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya.
- e. Bekerja di sektor non pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.
- f. Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan)

## **Pengeluaran Perkapita**

- a. Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga
- b. Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan+non makanan)

## **Fasilitas Perumahan**

- a. Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu
- b. Luas lantai per kapita adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebuah rumah dikategorikan sebagai rumah sehat apabila luas lantai per kapita yang ditempati minimal sebesar 8 m<sup>2</sup>. Sedangkan *World Health Organisation* (WHO) dan *American Public Health Association* (APHA) mensyaratkan luas lantai per kapita minimal 10 m<sup>2</sup>. Kategori luas lantai per kapita yang digunakan dalam publikasi ini adalah kurang dari sama dengan 8 m<sup>2</sup> sampai 15 m<sup>2</sup> dan lebih dari 15 m<sup>2</sup>.

## **Inflasi**

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang lain yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. IHK mengukur perubahan pengeluaran /biaya barang dan jasa (paket komoditas) yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga dari waktu ke waktu. Dengan kualitas dan kuantitas paket komoditas yang dianggap konstan pada tahun dasar, indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang dan jasa. Inflasi dihitung

dengan menggunakan metode "*point to point*" yaitu dengan membandingkan IHK dari periode sebelumnya.

<https://wonosobokab.bps.go.id>

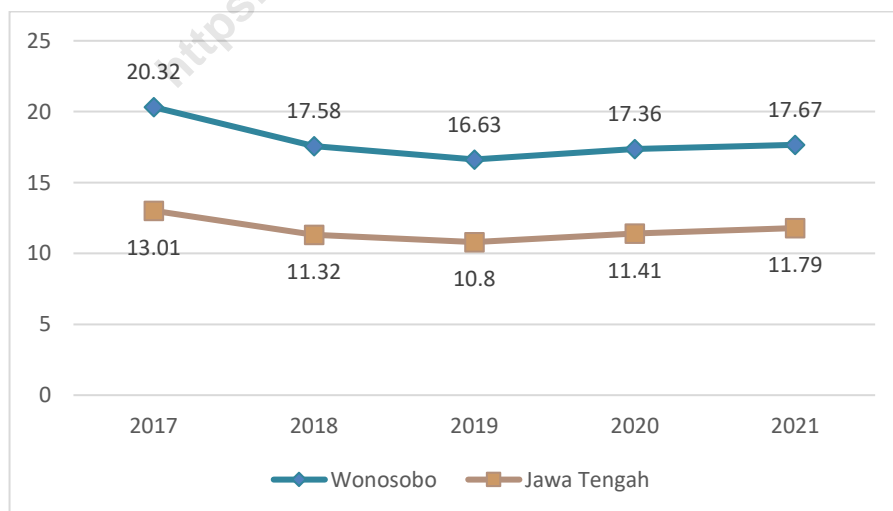
## BAB III ANALISIS KEMISKINAN

### 3.1 Kondisi Kemiskinan

#### 3.1.1 Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021

Permasalahan kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selama 10 tahun terakhir, isu kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan mendapatkan perhatian yang besar, bahkan mendapatkan prioritas pertama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah (Renstra Kab.Wonosobo). Selama lebih dari 5 tahun terakhir, Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat tiga besar kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak se-Jawa Tengah, bahkan tidak jarang tertinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah.

Grafik 3.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

Hingga tahun 2019, jumlah dan persentase penduduk miskin Wonosobo cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi selama dua tahun kemudian, yaitu 2020 – 2021, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada Grafik 3.1 dapat dilihat persentase penduduk miskin pada tahun 2017 adalah sebesar 20,32 persen, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 17,58 persen. Pada tahun 2019, penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 16,63 persen, kemudian mengalami kenaikan di 2020 dan 2021 menjadi 17,36 persen di tahun 2020 dan 17,67 persen di tahun 2021.

Kenaikan kemiskinan sejak tahun 2020 diakibatkan sebagai efek dari pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Wonosobo. Efek dari pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Pandemi covid-19 yang mulai mewabah di tahun 2020 menyebabkan penambahan penduduk miskin Wonosobo pada tahun 2020 sebesar 0,73 persen. Walaupun efek pandemi covid-19 di tahun 2021 tidak sebesar tahun 2020 tetapi efeknya masih terasa di tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi penambahan penduduk miskin Wonosobo sebesar 0,39 persen.

Jika kita bandingkan angka kemiskinan Wonosobo dan Jawa Tengah, terdapat perbedaan yang cukup jauh. Pada tahun 2017, angka kemiskinan Wonosobo adalah 20,32 persen sedangkan Jawa Tengah 13,01 persen, terjadi selisih 7,31 persen. Pada tahun 2021 selisihnya juga berkisar di 6 persen tepatnya 5,88 persen, atau mengalami penurunan selisih, artinya secara persentase pengurangan penduduk miskin di Wonosobo lebih cepat mengalami penurunan dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Walaupun persentase pengurangan tersebut cukup menggembirakan, tapi tetap saja jumlah penduduk miskin di Wonosobo masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten

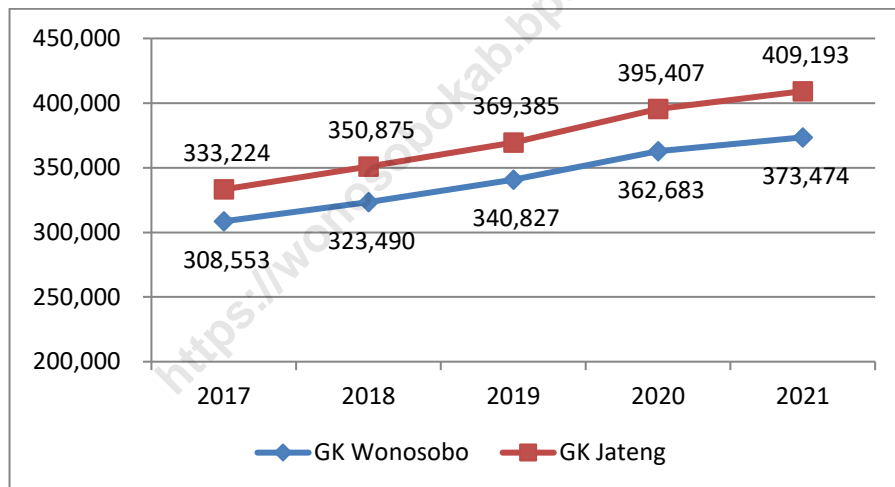


Wonosobo mengingat jumlahnya yang masih besar dibanding kabupaten lain.

### 3.1.2 Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 – 2021

Garis Kemiskinan adalah garis yang menunjukkan nilai minimal dari suatu rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak masuk dalam kelompok rumah tangga miskin. Seseorang dalam suatu rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan akan masuk dalam kelompok penduduk miskin.

Grafik 3.2. Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2017 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

Selama 5 tahun terakhir, yaitu 2017 – 2021, garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Artinya agar tidak masuk dalam kategori penduduk miskin, maka secara nominal konsumsi masyarakat di Wonosobo juga harus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, garis kemiskinan penduduk Wonosobo adalah Rp 308.553,- per kapita per bulan. Kemudian pada tahun 2018 menjadi Rp 323.490,- atau naik 4,84 persen dibanding

tahun 2017. Kemudian tahun 2019, 2020, dan 2021 naik masing-masing sebesar 5,36 persen, dan 6,41 persen, dan 2,98 persen. Kenaikan GK disebabkan salah satunya oleh inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan GK naik sehingga orang akan membutuhkan “pengeluaran” lebih jika ingin keluar dari kategori miskin. Itulah kenapa, sebisa mungkin inflasi perlu dikendalikan, bukan diminimalkan. Inflasi yang terlalu tinggi dan diluar batas kendali berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Garis kemiskinan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 373.474,-. Artinya seseorang akan masuk penduduk miskin jika konsumsi makanan dan non makanan selama sebulan di bawah Rp 373.474,-. Pengeluaran Rp 373.474,- per bulan tersebut diasumsikan sama untuk semua usia, baik remaja, dewasa, tua atau bayi yang belum mengkonsumsi makanan sama sekali. Jika diasumsikan dalam satu rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga, misal terdiri dari 2 orang dewasa, 1 anak-anak, dan 1 bayi, maka pengeluaran minimal per bulan agar tidak dikategorikan miskin adalah sebesar Rp  $373.474,- \times 4 = \text{Rp } 1.493.896,-$ .

Pada tahun 2021, terdapat 17,67 persen penduduk Wonosobo yang masuk kategori miskin, artinya pengeluaran per kapita selama sebulan dibawah garis kemiskinan tahun 2021 yaitu Rp 11.493.896,-. Jika kita lihat kondisi sepiantas di daerah-daerah perdesaan, memang kondisi ini sangat mungkin terjadi. Dari pendekatan pendapatan, contoh jika dalam rumah tangga tersebut yang bekerja hanya satu orang dengan penghasilan per hari Rp 70.000,- dan itupun tidak setiap hari menerima pendapatan, misal saja hanya 20 hari menerima penghasilan, maka per bulan hanya ada pendapatan Rp 1.400.000,- dan pendapatan tersebut bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga, tetapi untuk dana sosial kemasyarakatan juga, misalnya menengok orang sakit, dana sosial jika ada tetangga yang meninggal atau

melahirkan, dll. Sehingga alokasi untuk makan akan kurang dari penghasilan tersebut. Dari pendekatan konsumsi, seringkali konsumsi masyarakat di daerah perdesaan atau yang memang penghasilannya terbatas, konsumsi makan hanya sebatas nasi, sayur, tahu tempe atau ikan asin. Sedangkan konsumsi non makanan hanya yang pokok-pokok saja, sehingga pengeluarannya memang tidak banyak.

Jika kita bandingkan GK Wonosobo dan GK Jawa Tengah, selama 5 tahun terakhir, GK Jawa Tengah selalu lebih tinggi dari GK Wonosobo. Pada tahun 2021, GK Wonosobo adalah Rp 373.474,- sedangkan GK Jawa Tengah sebesar Rp 409.193,- atau selisih Rp 35.719,-. GK suatu wilayah yang lebih besar, mengindikasikan, salah satunya, bahwa harga makanan untuk memperoleh 2.100 kalori di wilayah tersebut lebih mahal.

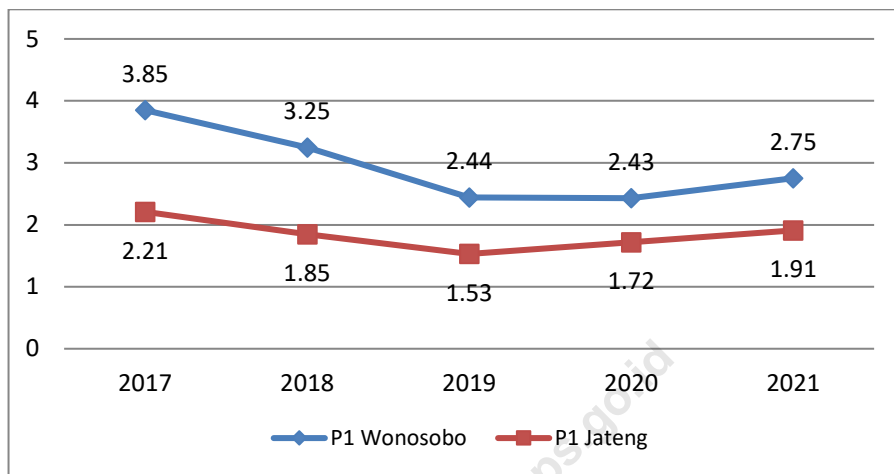
### **3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2017 – 2021**

Permasalahan kemiskinan bukan hanya jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator *Head Count Index/Head Count Ratio* (P0) hanya memperlihatkan berapa persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di suatu wilayah, namun tidak dapat menunjukkan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi. Sebagai contoh seseorang yang masuk kategori miskin, misal pengeluarannya selisih Rp 10.000,- dari GK, tahun berikutnya dia tetap masuk kategori miskin tetapi selisih pengeluaran dengan GK menjadi semakin jauh yaitu selisih Rp 30.000,-. Jika hanya melihat dari indikator P0 maka orang tersebut masih sama saja masuk kategori miskin, tetapi tingkat kemiskinan jauh lebih dalam/parah. Oleh karena itu diperlukan indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P2).

Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak (perbedaan/selisih) antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Walaupun indikator ini dapat menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan, akan tetapi indikator ini tidak dapat memberikan informasi tentang distribusi/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Maka dari itu dibutuhkan indikator lain guna mengukur hal tersebut yaitu dengan tingkat keparahan kemiskinan.

Penurunan angka P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan/selisih antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, artinya secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan usaha untuk keluar dari kategori miskin juga semakin kecil. Penurunan angka P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan, yang dilihat dari besarnya pengeluaran, antar penduduk miskin.

Grafik 3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2017 - 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

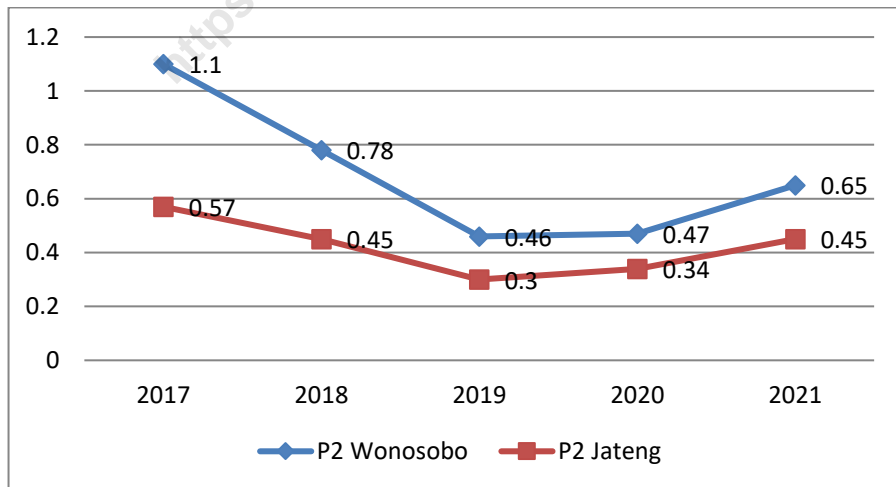
Selama 5 tahun terakhir, yaitu 2017 - 2021, tingkat kedalaman penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo cenderung mengalami penurunan. Selama empat tahun terakhir, tingkat kedalaman kemiskinan Wonosobo mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, tingkat kedalaman kemiskinan adalah 3,85 kemudian turun 0,60 poin menjadi 3,25 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan angka kedalaman kemiskinan yang cukup besar yaitu 0,81 poin menjadi 2,44. Karena adanya pandemi covid-19 yang mulai melanda Indonesia pada Maret tahun 2020, penurunan angka kedalaman kemiskinan hanya 0,01 poin di tahun 2020. Bahkan pada tahun 2021 angka kedalaman kemiskinan naik 0,32 poin, setelah empat tahun sebelumnya selalu mengalami penurunan.

Penurunan angka kedalaman kemiskinan berarti pengeluaran penduduk miskin (secara rata-rata) semakin mendekati garis kemiskinan. Artinya semakin berkurang *effort* yang dibutuhkan untuk

mengentaskan orang-orang yang masuk kategori miskin menjadi tidak miskin. Angka kedalaman pada tahun 2021 adalah sebesar 2,43. Jika dinominalkan secara rupiah, maka dibutuhkan minimal sebesar (2,75 x garis kemiskinan Wonosobo tahun 2021 x banyak penduduk Wonosobo) agar penduduk Wonosobo dapat keluar dari kategori penduduk miskin. Sehingga semakin kecil angka kedalaman kemiskinan maka “biaya” yang dibutuhkan untuk mengentaskan penduduk miskin semakin kecil, dengan asumsi GK dan jumlah penduduk sama.

Selama 2017 – 2021, tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Wonosobo selalu lebih tinggi dibanding tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti penduduk miskin di Wonosobo lebih jauh secara rata dari angka garis kemiskinan dibanding penduduk miskin Jawa Tengah secara umum.

Grafik 3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo, 2017 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, angka kedalaman kemiskinan dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat distribusi/sebaran pengeluaran antar penduduk miskin, apakah pengeluaran penduduk miskin ini cenderung homogen atau cenderung heterogen. Informasi tentang sebaran pengeluaran penduduk miskin ini dibutuhkan agar pengambil kebijakan tahu bagaimana sebenarnya variasi dari pengeluaran penduduk miskin. Jika pengeluarannya cenderung homogen yang ditandai dengan angka keparahan kemiskinan yang kecil, maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan antar penduduk miskin sama. Tetapi jika tingkat keparahan kemiskinan besar, maka akan ada penduduk yang sedikit diberi “bantuan” sudah bisa keluar dari kemiskinan tetapi akan ada penduduk yang butuh “bantuan” lebih besar agar bisa keluar dari kemiskinan. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan akan lebih berat jika angka keparahan kemiskinan akan lebih besar karena ada lebih banyak variasi seberapa jauh penduduk miskin tersebut dari garis kemiskinan dan ketidaktahuan siapa saja penduduk miskin dan berapa pengeluarannya, karena kemiskinan yang berasal dari Susenas adalah kemiskinan makro, yang mana hanya menggambarkan kemiskinan wilayah bukan kemiskinan individu.

Selama 2017 – 2021, tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo memiliki trend yang sama dengan persentase penduduk miskin. Selama tiga tahun terakhir, yaitu 2017 – 2019, tingkat keparahan kemiskinan mengalami penurunan, sedangkan dua tahun berikutnya, yaitu 2020 dan 2021 mengalami peningkatan. Tingkat keparahan kemiskinan tahun 2017 adalah 1,10, kemudian dua tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu menjadi 0,78 di 2018 dan menjadi 0,46 di 2019. Pada tahun 2020, tingkat keparahan kemiskinan naik 0,1 poin menjadi 0,47 dan di tahun 2021 naik cukup tinggi menjadi 0,65.

## **3.2 Karakteristik Penduduk Miskin**

Pembahasan berikutnya adalah karakteristik penduduk miskin Kabupaten Wonosobo dilihat dari beberapa bidang, yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

### **3.2.1 Pendidikan**

Pendidikan memiliki kaitan yang sangat kuat dengan kemiskinan. Ada banyak penelitian yang membahas pengaruh kemiskinan dan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan inilah yang akan menjadi modal dalam mencari pekerjaan. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi. Penghasilan yang lebih besar dapat digunakan untuk konsumsi yang lebih tinggi dan bervariasi, yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan.

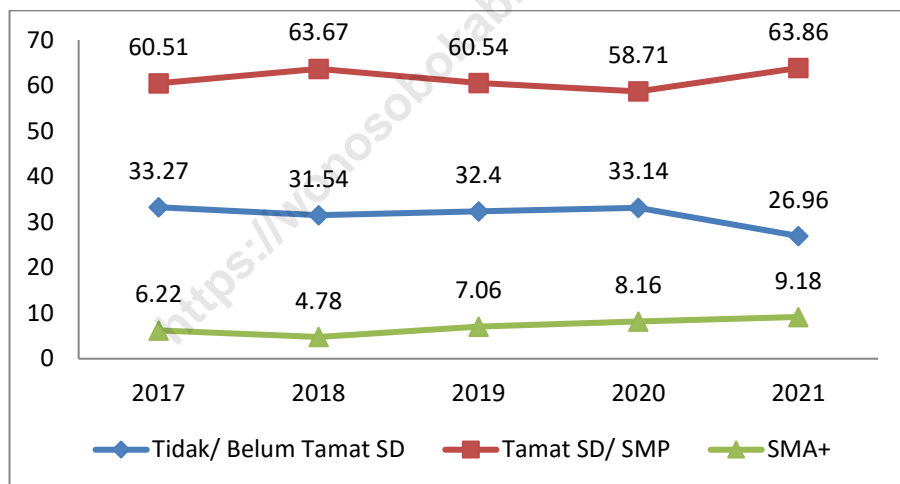
Seringkali kemiskinan dicirikan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Pada rumah tangga miskin, seringkali prioritas utama adalah pemenuhan makan dan minum. Pendidikan bukan prioritas utama, sehingga anak-anak yang hidup di rumah tangga miskin umumnya memiliki pendidikan yang rendah. Karena kondisi ekonomi yang tidak mendukung, seringkali anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan, kecuali yang memang orang tua dan anaknya sadar akan pentingnya pendidikan dan tetap mengupayakan pendidikan walaupun keadaan ekonomi tidak mendukung, tetapi ini hal yang sangat jarang. Pendidikan yang rendah akan membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan yang memberikan penghasilan



yang tinggi. Penghasilan yang rendah akan membuka peluang kemiskinan. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan akan terus terkait. Karena miskin sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan pendidikan yang rendah membuat penghasilan rendah. Hal tersebut akan terus berulang berulang ke generasi-generasi berikutnya jika tidak ada kebijakan pemerintah khususnya dan pemahaman akan pentingnya pendidikan dari pihak orang tua dan anak.

### Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan

Garfik 3.5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum tamat SD sebanyak 33,27 persen, 60,51 persen tamat SD/SMP, dan hanya 6,22 persen yang menamatkan jenjang SMA ke atas. Hingga tahun 2021, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA sederajat hanya 9,18 persen, sedangkan mayoritas yaitu sebesar 63,86 hanya lulus SD/SMP,

sedangkan sisanya yaitu 26,96 tidak/belum pernah bersekolah. Capaian pendidikan hingga jenjang SMA yang hanya 9,18 persen ini menggambarkan masih rendahnya pendidikan pada kelompok penduduk miskin, padahal sejak tahun 2016 pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun (hingga jenjang SMA sederajat) dan telah mengupayakan program-program pendukung target tersebut. PIP (Program Indonesia Pintar), bantuan pendidikan, dll ternyata masih tidak cukup sebagai pendorong agar penduduk miskin di Wonosobo menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang SMA sederajat. Terdapat banyak faktor yang menjawab penyebab masih rendahnya capaian pendidikan di Wonosobo terutama pada masyarakat miskin. Walaupun SPP hingga jenjang SMA sederajat sudah tidak membayar dan ada program PIP, tetapi banyak biaya pendidikan lain yang ternyata tidak sanggup penduduk miskinenuhi jika ingin menyekolahkan anaknya. Biaya seragam, transportasi, alat-alat tulis, buku-buku, dll adalah biaya yang masih harus dikeluarkan. Selain adanya biaya pendidikan lain yang masih harus dikeluarkan, pola pikir orang tua dan anak adalah faktor yang tidak kalah penting yang menentukan pendidikan. Seringkali keluarga miskin sudah enggan untuk mengeluarkan biaya pendidikan dan lebih memilih meminta anaknya bekerja seadanya, dengan penghasilan yang tidak seberapa daripada mereka mengeluarkan biaya pendidikan. Apalagi beberapa wilayah di Wonosobo kaya akan hasil bumi atau sektor pertanian, dan sektor pertanian di Wonosobo belum “membutuhkan” tenaga kerja dengan pendidikan yang terlalu tinggi.

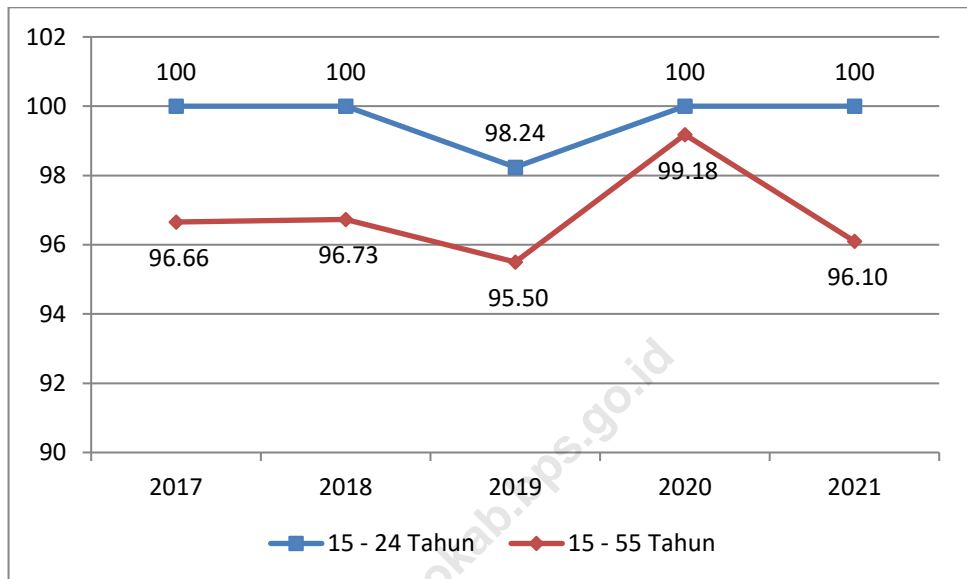
Jika kita bandingkan dengan Jawa Tengah, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir SMA ke atas di Jawa Tengah adalah 17,35 persen, hampir dua kali lipat dari Wonosobo yang hanya 9,18 persen. Dari angka tersebut, bagaimana mengupayakan agar pendidikan menjadi prioritas di Wonosobo masih menjadi agenda yang

butuh perhatian besar, selain permasalahan kemiskinan. Bagaimana Wonosobo ingin keluar dari kemiskinan jika penduduk miskinnya saja memiliki pendidikan yang masih jauh dari harapan. Butuh upaya dari pemerintah untuk mengubah pola pikir orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan. Bahwa dengan pendidikan yang tinggi, mereka akan memiliki bekal agar bisa keluar dari kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi lain.

### **Angka Melek Huruf (AMH)**

Selain pendidikan yang terakhir yang ditamatkan, indikator lain yang bisa digunakan untuk melihat capaian pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). AMH menggambarkan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis minimal dalam kalimat sederhana. Membaca dan menulis yang dimaksud disini tidak harus dalam huruf latin, tapi juga bisa huruf hijaiyah, huruf jawa, atau huruf lain. Jadi minimal dapat menulis dan membaca (bukan hanya membaca, tapi juga menulis) salah satu jenis huruf maka dikatakan dapat membaca dan menulis. AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas dan dapat membaca dan menulis terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Grafik 3.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angka Melek Huruf (AMH), 2017 - 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

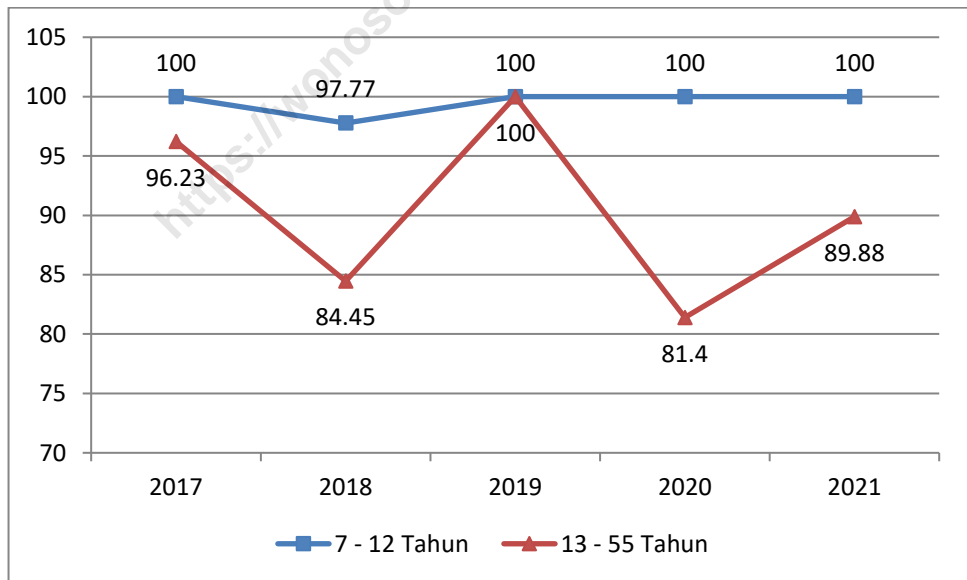
Selama 5 tahun terakhir, AMH penduduk miskin usia 15 – 24 tahun adalah 100, kecuali pada tahun 2019 yaitu 98,24. Pada tahun 2021 AMH penduduk miskin usia 15 – 24 tahun adalah 100, artinya penduduk miskin di Wonosobo usia 15 – 25 tahun sudah bisa membaca menulis semua. Sedangkan AMH penduduk miskin usia 15 – 55 tahun pada tahun 2020 adalah 96,10, artinya 96 orang dari 100 orang miskin usia 15 – 55 tahun sudah bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Tingginya Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin di Wonosobo merupakan hal positif karena kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar agar seseorang bisa mempelajari hal lain dan mengakses ilmu melalui tulisan. AMH yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar yang ada di Wonosobo sudah efektif. Kemampuan membaca dan menulis memungkinkan penduduk untuk memperoleh kemampuan

menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran dan terbuka untuk mengakses pengetahuan.

### Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator lain yang bisa digunakan untuk melihat capaian di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Bersekolah disini baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal yaitu kejar paket A, paket B, atau paket C.

Grafik 3.7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Angka Partisipasi Sekolah (APS), 2017 - 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

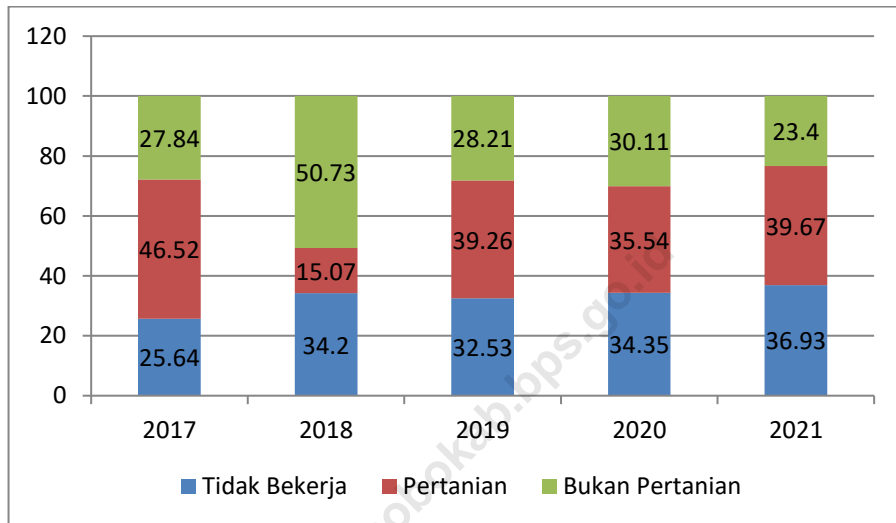
Selama tahun 2017 - 2021, Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin usia 7 - 12 tahun sudah 100 persen, kecuali pada tahun 2018

yaitu 97,77. Pada tahun 2021, APS penduduk miskin usia 7 – 12 tahun sudah 100, artinya seluruh penduduk miskin usia 7 – 12 tahun bersekolah, baik di jenjang SD atau SMP sederajat. Rentang usia 7 – 12 tahun biasanya identik dengan SD sederajat, artinya penduduk miskin di Wonosobo sudah merasa harus menyekolahkan anaknya setidaknya jenjang SD. Untuk usia 13 – 15 tahun, APS penduduk miskin selama 2017 – 2021 sangat berfluktuasi antar tahunnya. APS penduduk miskin usia 13 – 55 tahun, tahun 2021 adalah sebesar 89,88. Walaupun 100 persen penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah, yang biasanya identik dengan jenjang SD, tetapi di usia setelahnya yaitu 13-55 tahun persentase yang sekolah belum 100 persen. Saat ini pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun bahkan 12 tahun dengan memberikan subsidi di bidang pendidikan. Harapannya dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan kesempatan kerja yang didapat juga lebih baik. Jika hanya bermodalkan pendidikan hingga level SD, maka sudah dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang akan mereka dapatkan tidak akan memberikan penghasilan yang cukup untuk menopang kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dengan pendapatan yang kurang maka semakin susah mereka keluar dari jerat kemiskinan.

### **3.2.2 Ketenagakerjaan**

Masalah ketenagakerjaan memiliki kaitan dan peran yang sangat penting dalam permasalahan kemiskinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghitungan kemiskinan makro didasarkan dari besarnya pengeluaran makanan dan nonmakanan. Besarnya pengeluaran sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga, dan pendapatan sangat dipengaruhi oleh bidang pekerjaan dan status pekerjaan seseorang.

Grafik 3.8. Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha, 2017 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

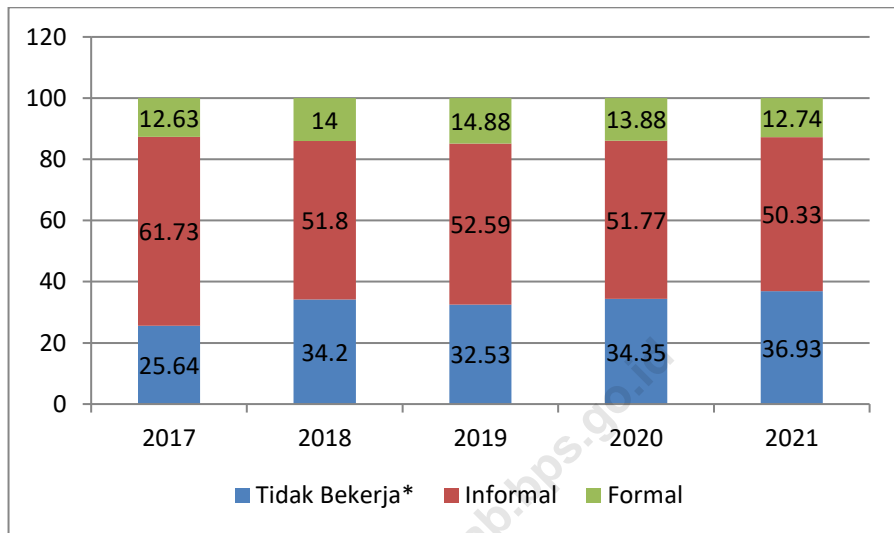
Pada tahun 2017 sebanyak 46,52 persen penduduk miskin bekerja di lapangan usaha pertanian, sebanyak 27,84 persen bekerja di nonpertanian, sedangkan 25,64 persennya tidak bekerja, termasuk juga yang masih sekolah dan bukan angkatan kerja. Selama 2017 – 2021, mayoritas penduduk miskin bekerja di lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2019 dan 2020, komposisi lapangan usaha penduduk miskin mulai mengalami perubahan. Jika tahun-tahun sebelumnya lebih dari 45 persen penduduk miskin bekerja di pertanian, mulai tahun 2018 kurang dari 40 persen yang bekerja di pertanian. Penduduk yang bekerja di nonpertanian cenderung mengalami peningkatan, begitu juga penduduk yang tidak bekerja. Pada tahun 2021, komposisi penduduk miskin yang tidak bekerja, yang bekerja di nonpertanian dan yang bekerja di pertanian, yaitu 36,93 persen tidak bekerja, 39,67

persen bekerja di pertanian, dan 23,4 persen bekerja di nonpertanian. Tinggi persentase penduduk miskin yang bekerja di pertanian sebanding dengan masih rendahnya pendidikan yang ditamatkan penduduk miskin. Untuk saat ini, pertanian di Wonosobo masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah, sehingga hasil pertanian juga belum maksimal, yang pada akhirnya penghasilan dari sektor pertanian masih rendah, padahal sebagian besar penduduk Wonosobo secara umum, termasuk juga penduduk miskin, bekerja di sektor pertanian.

Selama 2017 - 2021 penduduk miskin yang bekerja di pertanian maupun di nonpertanian cenderung mengalami penurunan. Yang perlu dicermati adalah meningkatnya penduduk miskin yang tidak bekerja selama lima tahun terakhir. Selama 2017 hingga 2021, terjadi penambahan persentase penduduk miskin yang tidak bekerja, dari 25,64 persen menjadi 36,93 persen. Walaupun dalam kelompok tidak bekerja ini mencakup juga yang bukan angkatan kerja (anak sekolah, ibu rumah tangga, lainnya) tetapi proporsi penduduk bukan angkatan tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti tiap tahunnya. Berdasarkan publikasi Angkatan Kerja Hasil Sakenas 2021, selama tiga tahun terakhir persentase bukan angkatan kerja dibanding total penduduk Wonosobo (miskin dan bukan miskin) berkisar antara 28 persen.



Grafik 3.9. Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Formal/Informal, 2017 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020, Badan Pusat Statistik

Dengan semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja, dan terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal, sektor informal menjadi pilihan agar penyerapan tenaga kerja dapat maksimal, termasuk tenaga kerja dari penduduk miskin. Berdasarkan hasil Susenas 2021, selama 2017 – 2021, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal selalu lebih dari 50 persen. Pada tahun 2017, 61,73 persen penduduk miskin bekerja di sektor informal, dan hanya 12,63 persen bekerja di sektor formal. Proporsi penduduk miskin yang bekerja di sektor informal mengalami kecenderungan menurun tiap tahunnya, seiring dengan penambahan penduduk miskin yang bekerja di sektor formal. Akan tetapi hingga tahun 2021, penduduk miskin yang bekerja di sektor informal tetap jauh lebih banyak dibanding yang bekerja di sektor formal. Pada tahun 2021, 50,33 persen penduduk miskin bekerja di sektor informal dan 12,74 persen bekerja di sektor formal.

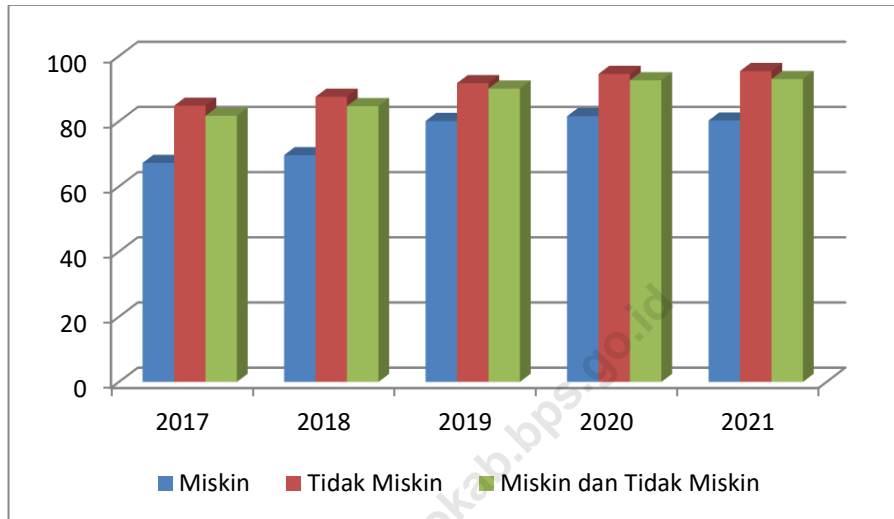
Penduduk miskin banyak bekerja di sektor informal karena sektor ini umumnya tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini sesuai masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk miskin yang hanya lulus SD sederajat.

### **3.2.3 Perumahan**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim serta makhluk hidup lain, serta tempat pengembangan kehidupan keluarga. Tempat tinggal yang layak dan sehat menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan kehidupan. Rumah yang layak dan sehat akan membuat orang yang tinggal didalamnya merasa nyaman dan tidak mudah sakit sehingga akan dapat memaksimalkan aktivitas penghuninya dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebaliknya, rumah yang tidak layak huni kurang mendukung kesehatan, tumbuh kembang, maupun aktivitas penghuninya.

Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dari 3 variabel yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas, sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel yaitu luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas buang air besar/jamban (Badan Pusat Statistik, 2015).

Grafik 3.10. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama, 2017 – 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

Selama 2017 – 2021, persentase penduduk yang memiliki jamban sendiri/ bersama meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017, 81,64 persen penduduk Wonosobo sudah menggunakan jamban sendiri/bersama, meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2021 menjadi 92,91 persen. Jika dikategorikan penduduk miskin dan tidak miskin, persentase penduduk tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama lebih tinggi dibanding penduduk miskin. Artinya persentase penduduk miskin yang menggunakan jamban bersama atau tidak mempunyai jamban lebih besar daripada penduduk tidak miskin. Pada tahun 2017, sebanyak 84,74 persen penduduk Wonosobo yang tidak miskin menggunakan jamban sendiri/bersama, sedangkan hanya 69,57 persen penduduk miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama. Pada 2017, selisih antara penduduk miskin dan tidak miskin masih jauh. Hingga tahun 2021, persentase

penambahan penduduk miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama meningkat lebih besar. Dari tahun 2017 hingga 2021, terjadi penambahan 12,99 persen warga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama dan 10,64 persen warga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama. Pada tahun 2021 sebanyak 95,38 persen penduduk tidak miskin dan 80,20 persen penduduk miskin menggunakan jamban sendiri/bersama. Penambahan penduduk miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama salah satunya merupakan hasil dari program jambanisasi dari pemerintah daerah Wonosobo. Diharapkan dengan sanitasi yang lebih baik akan meningkatkan kualitas kesehatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup sehingga dengan tubuh yang sehat, penduduk akan lebih produktif dan ekonomi akan semakin baik. Dengan tubuh yang jarang sakit, diharapkan asupan makanan dapat dimaksimalkan untuk tumbuh kembang bagi anak dan menjaga kesehatan, bukan untuk melawan penyakit. Dengan kebutuhan tubuh akan makanan yang cukup, maka penduduk akan lebih sehat dan pintar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas manusia dan dapat mengurangi kemiskinan pada jangka panjang.

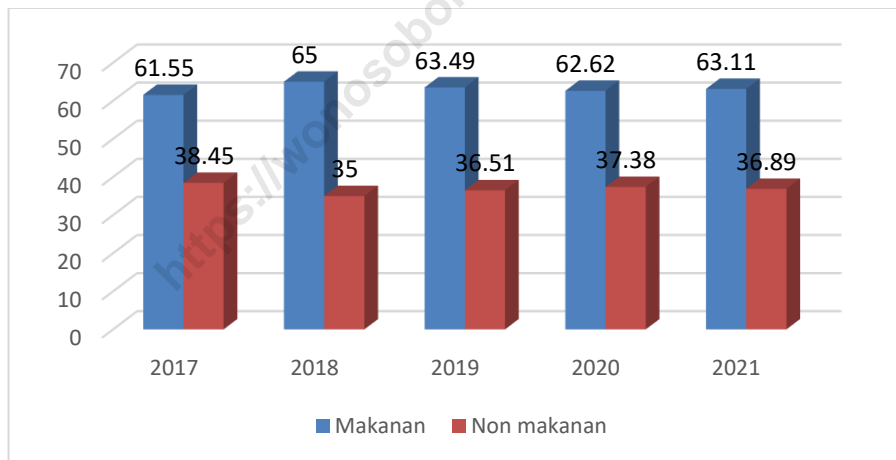
#### **2.3.4 Pola Konsumsi**

Konsumsi dalam pembahasan ini meliputi konsumsi penduduk miskin untuk pengeluaran makanan maupun nonmakanan. Pengeluaran untuk makanan (makanan dan minuman) dan nonmakanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dll) saling berkaitan. Pada kondisi perekonomian (pendapatan) yang terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas yang lebih utama. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, sebagian besar pendapatannya akan dihabiskan untuk konsumsi makanan. Seiring dengan penambahan pendapatan, umumnya proporsi pengeluaran

makanan akan berkurang seiring dengan meningkatkan proporsi pengeluaran nonmakanan.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Ernesr Angel (1987) mengemukakan bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Grafik 3.11. Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin untuk Komoditas Makanan dan NonMakanan, 2017 - 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2017, 61,55 persen pengeluaran penduduk miskin digunakan untuk konsumsi makanan, sedangkan 38,45 persen digunakan untuk konsumsi nonmakanan. Dari tahun ke tahun sejak 2017 hingga 2021, persentase pengeluaran untuk makanan pada penduduk miskin mengalami kenaikan dan penurunan antar tahun.

Pada tahun 2018, terjadi kenaikan proporsi pengeluaran makanan, tetapi dua tahun berikutnya mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali.

Pola konsumsi penduduk miskin di atas menggambarkan bahwa pada kelompok penduduk miskin di Wonosobo, kebutuhan akan pemenuhan makanan masih menjadi prioritas, bahwa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, persentase pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat, artinya hingga saat ini kebutuhan makanan pada kelompok penduduk miskin masih di bawah standar cukup, sehingga ketika terjadi penambahan pendapatan maka penambahan pendapatan tersebut digunakan untuk membeli makanan karena mereka masih merasa kurang akan pemenuhan kebutuhan makanan. Penambahan tersebut tidak digunakan untuk penambahan konsumsi nonmakanan tetapi digunakan untuk penambahan konsumsi makanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Semarang: BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Profil Masyarakat Kabupaten Wonosobo di Era New Normal, Analisis Hasil Survei Sosial Ekonomi Dampak Covid-19. Wonosobo: BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo Hasil Sakernas Agustus 2020. Wonosobo: BPS
- Bappenas. 2018. Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Jakarta: Bappenas
- Bappeda Wonosobo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo. Wonosobo Tahun 2016 - 2021 . Bappeda
- Susanto, Rudi dan Indah Pangesti. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. Journal of Applied and Economic Vol.5 No.4 (Juni 2019) 340-350
- Yuliana. 2018. Analisis Faktot-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tesis. Universitas Hasanudin
- <https://jatengdaily.com/2021/inflasi-pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan/>
- <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/11-target-yang-menjadi-fokus-utama-merdeka-belajar-tahun-20202035>
- <http://smk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip>
- <https://perkim.id/rtlh/definisi-rumah-tidak-layak-huni/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/akses-hunian-layak-dan-terjangkau-nasional-sebesar-5924-pada-2020>





## LAMPIRAN

Tabel 1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
	Wonosobo	Jawa Tengah	Wonosobo	Jawa Tengah
2017	20,32	13,01	98,6	4.450,7
2018	17,58	11,32	138,3	3.897,2
2019	16,63	10,8	131,3	3.743,2
2020	17,36	11,41	137,6	3.980,9
2021	17,67	11,79	139,67	4.109,8

**Tabel 2. Garis Kemiskinan, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat  
Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Wonosobo dan Jawa  
Tengah Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Wonosobo			Jawa Tengah		
	Garis Kemiskinan	P1	P2	Garis Kemiskinan	P1	P2
2017	308.553	3,85	1,1	333.224	2,21	0,57
2018	323.490	3,25	0,78	350.875	1,85	0,45
2019	340.827	2,44	0,46	369.385	1,53	0,3
2020	362.683	2,43	0,47	395.407	1,72	0,34
2021	373.474	2,75	0,65	409.193	1,91	0,45

**Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Wonosobo			Jawa Tengah		
	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD/ SMP	SMA+	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD/ SMP	SMA+
2017	33,27	60,51	6,22	30,00	57,60	12,40
2018	31,54	63,67	4,78	31,82	56,22	11,97
2019	32,40	60,54	7,06	30,31	56,48	13,21
2020	33,14	58,71	8,16	29,51	55,15	15,34
2021	26,96	63,86	9,18	28,05	54,60	17,35

**Tabel 4. Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021**

Tahun	AMH Wonosobo		AMH Jawa Tengah	
	15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun	15 - 24 Tahun	15 - 55 Tahun
2017	100,00	96,66	99,45	97,35
2018	100,00	96,73	99,89	97,17
2019	98,24	95,50	99,83	97,29
2020	100,00	99,18	99,87	97,80
2021	100,00	96,10	99,85	97,63

**Tabel 5. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021**

Tahun	APS Wonosobo		APS Jawa Tengah	
	7 - 12 Tahun	13 - 55 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 55 Tahun
2017	100,00	96,23	99,80	91,07
2018	97,77	84,45	99,49	91,54
2019	100,00	100,00	99,76	93,19
2020	100,00	81,40	99,57	95,56
2021	100,00	89,88	99,39	94,20

**Tabel 6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Lapangan Pekerjaan Utama Wonosobo			Lapangan Pekerjaan Utama Jawa Tengah		
	Tidak Bekerja*	Pertanian	Bukan Pertanian	Tidak Bekerja*	Pertanian	Bukan Pertanian
2017	25,64	46,52	27,84	37,89	27,48	34,63
2018	34,20	15,07	50,73	39,93	18,51	41,56
2019	32,53	39,26	28,21	40,91	24,38	34,71
2020	34,35	35,54	30,11	40,83	23,44	35,73
2021	36,93	39,67	23,40	40,88	29,14	29,98

Catatan: \*) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

**Tabel 7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Kegiatan Formal/Informal Wonosobo			Kegiatan Formal/Informal Jawa Tengah		
	Tidak Bekerja*	Informal	Formal	Tidak Bekerja*	Informal	Formal
2017	25,64	61,73	12,63	37,89	44,62	17,49
2018	34,20	51,80	14,00	39,93	40,25	19,82
2019	32,53	52,59	14,88	40,91	39,32	19,77
2020	34,35	51,77	13,88	40,83	38,59	20,59
2021	36,93	50,33	12,74	40,88	41,19	17,92

Catatan: \*) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

**Tabel 8. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban  
Sendiri/Bersama di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun  
2017 – 2021**

Tahun	Wonosobo			Jawa Tengah		
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin	Miskin dan Tidak Miskin
2017	67,21	84,74	81,64	78,26	90,86	89,48
2018	69,57	87,50	84,62	81,91	90,89	90,03
2019	80,08	91,67	90,01	85,07	93,32	92,58
2020	81,54	94,5	92,54	87,73	94,58	93,92
2021	80,20	95,38	92,91	88,72	95,36	94,71



**Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai per Kapita di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021**

Tahun	Wonosobo			Jawa Tengah		
	<= 8	8<luas<=15	>15	<= 8	8<luas<=15	>15
2017	6,19	46,66	47,14	8,60	33,38	58,03
2018	8,95	41,97	49,09	8,19	34,48	57,33
2019	9,15	44,54	46,31	10,70	32,02	57,28
2020	9,34	39,36	51,31	8,27	35,81	55,92
2021	-	-	-	-	-	-

<https://wonosobokab.bps.go.id>

**Tabel 10. Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin untuk Komoditas Makanan dan Nonmakanan di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah Tahun 2017- 2021**

Tahun	Wonosobo		Jawa Tengah	
	Makanan	Non makanan	Makanan	Non makanan
2017	61,55	38,45	65,53	34,47
2018	65,00	35,00	65,35	34,65
2019	63,49	36,51	63,36	36,64
2020	62,62	37,38	62,61	37,39
2021	61,55	38,45	65,53	34,47



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN WONOSOBO**

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km 2.2 Wonosobo

Telp: (0286) 324270 Fax: (0286)3325380

Homepage: <https://wonosobo.bps.go.id> Email: [bps3307@bps.go.id](mailto:bps3307@bps.go.id)